

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami situasi problematik yang dihadapi penduduk miskin di pedesaan --khususnya penerima bantuan dana IDT-- dalam usaha mereka mengembangkan kemampuan ekonomi dan keberdayaan sosialnya, serta sekaligus untuk mengkaji peran dan manfaat program IDT dalam memperkuat penyangga ekonomi keluarga dan mendukung upaya pemberdayaan penduduk miskin di pedesaan. Terutama di sini tentang bentuk resistensi macam apakah yang dikembangkan penduduk miskin dalam menyiasati intervensi dan dominasi yang dilakukan aparat.

Studi ini dilakukan di 16 desa IDT yang tersebar di 16 Dati II yang ada di Propinsi Jawa Timur. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 800 keluarga miskin penerima dana IDT, sedangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, dalam penelitian ini telah diteliti sebanyak 40 informan yang diambil dari 8 desa yang secara sosiologis telah dikenal dengan baik oleh peneliti.

Pada batas-batas tertentu, studi ini telah berhasil memaparkan bahwa situasi kemiskinan yang dihadapi penduduk miskin ternyata bukan sekadar persoalan kurangnya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan apa yang disebut Robert Chambers dengan istilah "perangkap kemiskinan". Sementara itu, mekanisme survival yang biasanya dikembangkan keluarga-keluarga miskin untuk menyiasati tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup keluarganya adalah dengan cara mendayagunakan tenaga kerja istri (kaum wanita) dan bahkan anak-anak untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarga. Dalam situasi krisis, tidak jarang keluarga miskin juga memperlakukan kerabat sebagai semacam asuransi sosial untuk meminta bantuan yang dibutuhkan --termasuk bantuan ekonomi.

Sebagai suatu program yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan produktif dan memberdayakan masyarakat miskin, program IDT ternyata tidak selalu mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat miskin itu sendiri, karena dalam pelaksanaannya program tersebut justru lebih mengedepankan kepentingan negara dan ukuran-ukuran yang kuantitatif-ekonomistik --yang terlalu menekankan pada logika produksi-- dan kepentingan mempertahankan atau membangun kondite aparat daripada memberdayakan potensi swadaya lokal secara bottom-up.

Bentuk intervensi dan dominasi yang dilakukan aparat selama proses pelaksanaan program IDT di berbagai desa yang diteliti terjadi mulai dari awal penyeleksian keluarga-keluarga mana yang berhak memperoleh bantuan, intervensi dalam penyusunan DUK-1 dan bahkan tidak jarang sampai pada tindakan sepihak untuk melakukan penyunatan terhadap dana IDT yang seharusnya secara keseluruhan harus diberikan kepada keluarga-keluarga miskin di desa.

Meski tidak dilakukan secara terbuka atau protes terang-terangan, dominasi dan intervensi yang dilakukan negara untuk "mensukseskan" program IDT melalui campur tangan aparat desa dan kecamatan, serta pendamping yang berlebihan, ternyata telah melahirkan aksi perlawanan dalam bentuk sikap resistensi diskursif yang mengacu kepada pertimbangan nilai baik-buruk dan norma sosial yang berlaku di komunitasnya pada saat itu.

Secara garis besar, ada dua implikasi teoritik yang penting untuk dicatat dari hasil studi ini. Pertama, implikasi hasil studi ini terhadap pemilihan paradigma pembangunan untuk mengentaskan masyarakat miskin. Kedua, implikasi hasil studi ini bagi pemilihan cara pandang atau perspektif untuk mengkaji persoalan resistensi sosial yang dilakukan masyarakat miskin dalam konteks aksi perlawanan mereka terhadap dominasi negara.

Studi ini memperlihatkan bahwa untuk memahami aksi resistensi masyarakat miskin yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk melakukan suatu proses dialektika --yang mencoba memadukan dan menjembatani sejauh mana kekakuan struktur dan otoritas individu dalam bertindak saling berkaitan satu dengan yang lain dalam menciptakan zone-zone sosial bagi masyarakat miskin itu sendiri.

Sikap yang mencoba memaksakan diri untuk menjelaskan aksi perlawanan masyarakat miskin secara deterministik, selain cenderung mereduksi salah satu elemen penting perlawanan sosial itu, juga menyebabkan penjelasan menjadi terkesan mekanistik. Sementara itu, keinginan untuk menjelaskan aksi perlawanan sosial masyarakat miskin semata dari perspektif fenomenologi, selain hanya akan melahirkan penjelasan yang parsial, juga akan menyebabkan analisis terjebak pada penjelasan yang bersifat ideologik (***).